

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan lingkungan di Indonesia yang sudah tidak asing lagi adalah sampah. Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi yang sangat mempengaruhi bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang sangat beragam. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak dan dibuang ke lingkungan. Persoalan sampah bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga soal kenyamanan kota yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat akibat polusi bahan beracun yang berasal dari sampah.

Pola hidup dan budaya masyarakat yang saling berkaitan menjadikan persoalan sampah yang tiada hentinya untuk dibahas. Daya beli masyarakat yang semakin meningkat akan jenis dan bahan pokok serta meningkatnya kegiatan dan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi disuatu tempat juga memberi pengaruh yang cukup besar pada kualitas dan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah juga memberi pengaruh yang besar pada kualitas dan jumlah sampah yang dihasilkan. Sehingga dengan melonjaknya daya muat sampah maka membutuhkan penanganan serta pengelolaan

Sampah menjadi salah satu masalah besar di Kota Bandung. Dimana Kota Bandung sempat di juluki dengan Bandung Lautan Sampah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk terbesar ke 3 (2018) dengan jumlah penduduk 2.503.708 dan wilayah Kota Bandung yang luasnya 167,29 km<sup>2</sup>. Kota Bandung yang setiap tahun menjadi tujuan wisata dan tujuan urbanisasi sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk semakin tinggi juga padat, menjadikan Bandung sebagai Kota Metropolitan, sehingga aktivitas di Bandung kurang kondusif, dan Bandung pun menjadi semakin kotor sehingga persoalan sampah harus dihadapi dengan serius.

Volume sampah di Kota Bandung saat ini di perkirakan bisa mencapai 1.600 ton/hari yang sering terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) belum lagi sampah ini dapat menumpuk pada agenda-agenda hari besar atau hari libur panjang. Berikut data produksi sampah di Kota Bandung :

**Tabel 1.1**

No	Sumber	Produksi Sampah/ton
1	Pemukiman	1.048.96
2	Pasar	200.32
3	Kantor	88.32
4	Daerah Komersil	95.84
5	Fasilitas Publik	44.96
6	Lainnya	21.6

(Sumber : Data PD Kebersihan Kota Bandung 2019)

Permasalahan sampah serta pengelolaan dan pemanfaatannya memang tanggung jawab pemerintah, akan tetapi guna tercapainya sebuah kebijakan dan program pemerintah maka harus ada campur tangan masyarakat. maka dari itu Pemerintah Kota Bandung melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan PD Kebersihan Kota Bandung berambisi untuk melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah sampah. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan daerah No 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai bentuk aksi nyata Pemerintah Kota Bandungpun mengadakan berbagai pengelolaan dan pemanfaatan sampah seperti dengan Biodigester, Bank Sampah, pengomposan dan lain-lain hingga menyediakan tempat sampah disepanjang jalan bahkan sampai menambah angkutan sampah. Akan tetapi cara ini belum berhasil dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya, bukan hanya itu ketidaksadaran masyarakat akan akomodasi yang disediakan pun menjadi rusak.

Berkaca dari hal itu, dengan banyaknya program pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Bandung optimis bahwa Kota Bandung bisa menangani sampah dengan baik. Maka dari beberapa program penanganan serta pengelolaan sampah diciptakanlah program “KANG PISMAN” yang merupakan kepanjangan dari “Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan.”

Kang Pisman merupakan sebuah program pengelolaan sampah modern yang beralih mulai dengan cara mengumpulkan lalu mengangkut dan membuang sampah tersebut menjadi sebuah budaya (*Zero waste life style dan 3R atau Reduce, Reuse dan Recycle*)

Melalui program Kang Pisman (kurangi, pisahkan dan manfaatkan) Pemerintah Kota Bandung berharap bisa lebih baik lagi dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah. Maka dari itu pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat agar terbiasa dalam mengolah sampah dengan bijak dari yang mereka hasilkan. Sebagai salah satu program yang fokus pada penanganan sampah, kang pisman (kurangi pisahkan dan manfaatkan) ini mulai di beberapa kelurahan dan kecamatan bahkan di tempat umum di Kota Bandung.

Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kiaracondong yang memiliki 130.537 jiwa. Kecamatan Kiaracondong termasuk dalam tiga besar dengan penduduk terbanyak di Kota Bandung, itu berarti Kecamatan Kiaracondong menyumbang juga menghasilkan produksi sampah yang cukup besar dan membutuhkan penanganan juga pengelolaan yang cukup serius. Kelurahan yang berada di Kecamatan Kiaracondong salah satunya adalah Kelurahan Babakan Sari yang memiliki 40.476 jiwa dengan produksi sampah 8,83/ton perhari.

Program Kang Pisman (kurangi pisahkan dan manfaatkan) di Kelurahan Babakan Sari sudah berjalan sejak tahun 2018 saat diresmikan oleh Wali Kota Bandung bahkan sudah mulai diterapkan dan kelurahan Babakan Sari pun terpilih menjadi salah satu role model Program Kang Pisman. Akan tetapi berdasarkan hasil pra survei yang ditemukan peneliti melihat masih adanya tumpukan sampah yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir sampah, hal ini juga ada dalam Laporan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Kelurahan Babakan Sari. Selain itu berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu staf di Kelurahan Babakan

Sari mengatakan bahwa dari 18 RW yang ada di Kelurahan Babakan Sari belum semua aktif melakukan program Kang Pisman ini dan Kelurahan Babakan sari mengalami Penurunan peringkat di bandingkan kelurahan lainnya.

Selain itu juga masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang menghambat proses pengumpulann juga pengangkutan sampah.

**Tabel 1.2**

**Sarana Pengumpulan Sampah**

<b>RW</b>	<b>Timbunan sampah (ton/hari)</b>	<b>Sarana pengumpulan</b>	<b>Kondisi sarana</b>
1	0,48	1 motor sampah, 1 Gerobak	Tidak Layak
2	0,45	1 motor sampah,2 gerobak	Layak
3	0,52	1 motor sampah, 4 gerobak	Layak
4	0,43	1 motor sampah	Tidak layak
5	0,42	1 moto sampah, 1 gerobak	Tidak Layak
6	0,46	1 motor sampah, 2 Gerobak	Layak
7	0,47	1 motor sampah, 2 gerobak	Layak
8	0,54	1 motor sampah, 3 gerobak	Tidak layak
9	0,57	1 motor sampah, 2 gerobak	Layak
10	0,51	1 motor sampah, 4 gerobak	Layak
11	0,59	1 motor sampah, 2 gerobak	Layak
12	0,49	1 motor sampah, 2 gerobak	Tidak layak
13	0,48	1 motor sampah	Layak
14	0,47	1 motor sampah, 1 gerobak	Tidak layak

15	0,49	1 motor sampah, 2 gerobak	Layak
16	0,47	1 motor sampah, 1 gerobak	Layak
17	0,51	1 motor sampah, 3 gerobak	Tidak Layak
18	0,49	1 motor sampah, 1 gerobak	Tidak Layak

(Sumber: Data dari Kelurahan Babakan sari 2020)

Dari data diatas bisa dilihat bahwa dari 18 RW di Kelurahan Babakan sari, masih ada 8 RW yang memiliki sarana belum memenuhi kebutuhan atau tidak layak sehingga masih ada hambatan dalam pengangkutan sampah ke TPS.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti menganggap penting dilakukan pengkajian lebih lanjut yang pembahasannya berupa karya ilmiah bernama skripsi dengan judul **“Implementasi Program Kang Pisman dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Masih adanya masyarakat yang belum aktif dalam melaksanakan Program Kang Pisman (kurangi pisahkan dan manfaatkan).
2. Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan Program Kang Pisman (kurangi pisahkan dan manfaatkan).

### **C. Rumusan Masalah**

Melihat identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi program kang pisman (kurangi, pisahkan, manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong?
2. Bagaimana Sumber Daya dalam implementasi program kang pisman (kurangi,pisahkan, manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong
3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program kang pisman (kurangi,pisahkan,manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakan sari Kecamatan Kiaracandong
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi program kang pisman (kurangi,pisahkan,manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi program kang pisman (kurangi,pisahkan, manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi program kang pisman (kurangi, pisahkan, manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong

3. Untuk mengetahui disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program kang pisman (kurangi, pisahkan, manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakann Sari Kecamatan Kiaracandong.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi program kang pisman (kurangi, pisahkan, manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong.

#### **E. Kegunan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan bagi peneliti adalah untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan serta memberikan manfaat berupa pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya di konsentrasi Kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untu bahan informasi penulisan dengan kajian topik serupa.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep dari proses penelitian yang memiliki kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka agar tercapai hasil suatu penelitian.



Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kajian administrasi publik khususnya pada kebijakan publik, hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup administrasi menurut Nicholas Henry yang terdiri dari :

1. Organisasi publik yang berkaitan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yang berkaitan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yang berkaitan dengan pendekatan pada kebijakan publik serta implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Setiap pemerintahan mempunyai harapan keberhasilan terhadap suatu kebijakan yang telah direncanakannya. Dalam proses merealisasikan suatu kebijakan tentunya dibutuhkan andil dari masyarakat atau publik dan bagaimana suatu kebijakan itu bisa berhasil tentu membutuhkan suatu administrasi publik agar lebih mengetahui serta memahami bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat atau publik itu sendiri, serta mengetahui bagaimana suatu kegiatan atau program diimplementasikan secara efektif dan efisien sebagaimana pendapat dari Chandler dan Plano dalam (Hakim 2011:20) bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

mengimplementasikan, menformulasikan serta mengelola keputusan dari kebijakan publik.

Administrasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Sedangkan administrasi publik diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. (Mulyadi 2016:33)

Dalam sebuah administrasi publik pasti terdapat kajian kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah guna mengatasi masalah atau hambatan yang terjadi di sekitar masyarakat sehingga semua bisa sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam kebijakan publik memiliki salah satu bagian yang disebut dengan implementasi kebijakan yang berisi peraturan, undang-undang atau sebuah program guna memecahkan masalah publik, karena sejatinya kebijakan tanpa implementasi maka tidak berarti sama sekali.

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Menurut Gordon dalam (Mulyadi 2016:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Dengan adanya permasalahan sampah yang sering terjadi, maka Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa sampah sehingga terbentuklah Program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman).

Pembahasan skripsi tentang implementasi program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong yang sedang diteliti oleh peneliti mempunyai tujuan untuk memberi gambaran atau deskripsi bagaimana program kang pisman ini berjalan.

Teori implementasi dari George C. Edward III merupakan landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam proses pembahasan serta pemecahan dalam penelitian ini. Tujuan dari digunakannya teori ini yaitu untuk mengukur suatu keberhasilan proses implementasi program atau kebijakan.

Maka untuk mengukur sejauh mana proses implementasi program Kang Pisman di Kelurahan Babakan Sari George C. Edward III dalam (Mulyadi 2016:68) mengemukakan 4 dimensi variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan

dengan secara jelas dan konsisten, namun apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

### 3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Disposisi merupakan karakteristik atau watak yang harus dimiliki oleh seorang implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki sifat yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan proses implementasi pun menjadi efektif.

### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan. salah satu aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operasional procedure* atau SOP). SOP menjadi sebuah pedoman untuk setiap implementator dalam bertindak.

Keempat dimensi diatas menjelaskan bagaimana suatu implementasi program atau kebijakan bisa berhasil, maka dapat disimpulkan dalam kerangka pemikiran yaitu :

### Model Kerangka Pemikiran



